

Meninjau Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Di Indonesia Sebuah Studi Literatur

Beatrix Yunarti Manehat¹, Fulgensius Oswin Sanda²

1,2, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Beatrix Yunarti Manehat

E-mail: manehatbeatrix@gmail.com

Abstrak

Kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi nasional terkategori signifikan. Untuk itu, IAI mengeluarkan SAK EMKM sebagai standar akuntansi keuangan yang khusus untuk UMKM agar para pelaku UMKM terbantu dalam kinerja keuangannya. SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam peningkatan literasi keuangan, memperingkas pelaporan keuangan, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif sebagaimana yang telah diatur standarnya dalam SAK EMKM akan lebih cepat menarik kepercayaan pemodal yang dapat mendukung kemajuan UMKM. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk melihat gambaran pemberlakuan SAK EMKM pada sektor UMKM di Indonesia. Pertanyaannya adalah sudahkah UMKM menggunakan SAK EMKM dalam kegiatan akuntansi di usahanya. Penelitian menggunakan metode kajian kepustakaan (library research. Metode ini mengarahkan peneliti untuk mencari, menemukan dan menganalisis data dari buku, jurnal dan literatur lain terkait topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di berbagai daerah di Indonesia belum menerapkan SAK EMKM. Berdasarkan telaah literatur, tidak hanya UMKM di bagian timur Indonesia, tetapi UMKM yang terletak di Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah banyak yang belum menerapkan SAK-EMKM. Umumnya, alasan utamanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci– Penerapan, SAK EMKM, UMKM

Abstract

The contribution of MSMEs to national economic growth is categorized as significant. For this reason, IAI has issued SAK EMKM as a financial accounting standard specifically for MSMEs so that MSME actors are assisted in their financial performance. SAK EMKM is expected to assist MSME actors in increasing financial literacy, simplifying financial reporting, and increasing the credibility of financial reports. Accountable and comprehensive financial reports as standardized in SAK EMKM will more quickly attract investors' trust who can support the progress of MSMEs. Thus, this research is intended to see an overview of the implementation of SAK EMKM in the MSME sector in Indonesia. The question is have SMEs used SAK EMKM in accounting activities in their business. The research uses a library research method. This method directs the researcher to seek, find and analyze data from books, journals and other literature related to the research topic. The results show that the majority of MSMEs in various regions in Indonesia have not implemented SAK EMKM. Based on the literature review, not only MSMEs in eastern Indonesia, but many MSMEs located in West and Central Indonesia have not implemented SAK-EMKM. Generally, the main reason is the low quality of human resources.

Keywords- Application, SAK EMKM, MSME

PENDAHULUAN

Pada Triwulan ke II tahun 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Selama enam belas tahun belakangan, angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencatatkan nilai yang baik selama triwulan terakhir di saat krisis terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini bahkan terjadi saat terdapat peningkatan kasus covid-19 di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas tentu tidak lepas dari peranan para pelaku bisnis, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tak bisa dipungkiri UMKM menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM dengan jumlah 64,2 juta mampu menyumbangkan kontribusi 61,07 % pada PDB yang jika dirupiahkan memiliki nilai sebesar 8.573,89 triliun rupiah.

Selanjutnya, terdapat peningkatan kontribusi UMKM sebanyak 22,9% pada PDB atas dasar harga konstan. Jika dirupiahkan 22,9% ini berarti mengalami peningkatan 5.721,1 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, kontribusi UMKM pada PDB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan 5,7% yang jika dirupiahkan setara dengan Rp 9.580,8 triliun rupiah (Dwi Hadya Jayani, 2021). Dibandingkan jenis usaha lainnya di Indonesia, UMKM mempekerjakan 97 % tenaga kerja. Angka 97 % ini setara dengan 119,6 juta yang berarti terdapat 119,6 juta orang yang bekerja sebagai tenaga kerja di UMKM Indonesia. Rincian 119,6 juta di atas adalah 63,4 juta merupakan tenaga kerja di Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu merupakan pekerja di Usaha Kecil serta terdapat 60,7 ribu orang yang menjadi tenaga kerja Usaha Menengah (UM). Penyerapan tenaga kerja di kelompok UMKM ini terus meningkat sejak tahun 2018 dengan presentasi 2,21%. Sedangkan Usaha Besar (UB) hanya mampu menyerap 3,6 juta pekerja dan jumlah UB di Indonesipun tergolong kecil yakni 5,5 % yang berarti menempati posisi 0,01 % dari keseluruhan usaha yang ada di Indonesia.

Selain berkontribusi dari segi penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menyumbangkan investasi yang besar. Adapun investor yang menyumbangkan dananya di UMKM mencapai presentase 60,4% dari keseluruhan investasi yang ada di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Di era teknologi ini, UMKM juga mulai berkontribusi dari segi digital. Terdapat 4,8 juta UMKM di bulan maret 2021 yang telah mendaftarkan diri dalam program *go digital* Bangsa Buatan Indonesia. Jumlah ini sudah melebihi target pemerintah untuk UMKM digital yakni 2 juta UMKM.

Data dan fakta di atas menunjukkan besarnya kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia. Namun, apakah pelaku UMKM sudah menerapkan SAK UMKM untuk menunjang kinerja keuangannya? Jika tidak diterapkan maka para pelaku UMKM akan sulit berkembang. Pengambilan keputusan di UMKM akan kurang terarah mengingat laporan keuangan merupakan kunci dalam pengambilan keputusan usaha. Pelaku UMKM di NTT misalnya disarankan untuk bergabung ke koperasi karena UMKM di NTT masih mengalami kesulitan dalam modal pemasaran serta masih terkendala dalam sumber daya manusia (Menteri Koperasi dan UKM, 2021).

Di sisi lain UMKM juga masih mengalami kelemahan dalam sistem keuangan khususnya dalam proses pencatatan. SAK EMKM terbitan IAI yang ditujukan untuk membantu UMKM dalam perbaikan siklus akuntansinya justru mengalami berbagai kendala dalam pengaplikasiannya. Para

pelaku UMKM di NTT misalnya, masih mengalami kesulitan dalam hal penerapan akuntansi sesuai dengan SAK EMKM pada proses akuntansi di dalam usahanya. Kesulitan ini tentu akan membuat UMKM tidak mengetahui dengan pasti jumlah aset, hutang hingga modal yang dimiliki. Di sisi lain, UMKM akan kesulitan mendapatkan pinjaman dari para pemodal saat mereka tidak memiliki laporan keuangan yang komprehensif dan terstandar. Dengan demikian, studi literatur ini dilakukan untuk memotret bagaimana penerapan SAK EMKM di Indonesia mengingat SAK EMKM merupakan pedoman untuk melakukan penilaian pada kinerja keuangan, proses pengambilan keputusan serta keberlanjutan UMKM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

UMKM

UU No. 20 Tahun 2008 mengatur jaminan serta keadilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan utamanya adalah agar UMKM lebih bebas dan kreatif dalam meningkatkan kualitas, peran, potensi hingga kontribusi baik pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. UU No 20 Tahun 2008 ini juga merupakan sarana untuk mempermudah UMKM dalam membuka lapangan kerja serta meniadakan kemiskinan di Indonesia.

UMKM perlu dijamin keamanan usahanya karena jumlah UMKM meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga berarti kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi Indonesia turut meningkat dari tahun ke tahun. Berikut rekapitan perkembangan UMKM dan kontribusinya di Indonesia:

Tabel 1.

Rekapitan perkembangan UMKM dan Kontribusinya di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM	Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja/tahun
2012	52.206.444 unit UMKM	14,70% pertahun
2013	56.534.592 unit UMKM	14,70% pertahun
2014	57.895.721 unit UMKM	14,70% pertahun
2015	59.262.772 unit UMKM	14,70% pertahun
2016	61.651.177 unit UMKM	14,70% pertahun
2017	62.922.617 unit UMKM	14,70% pertahun

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Dari uraian tabel di atas dapat dipahami bahwa UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan baik. UMKM dapat diandalkan sebagai senjata untuk pertumbuhan ekonomi di level lokal nasional saat terjadi krisis maupun pandemi. Dengan kontribusi yang besar ini keamanan dan pertumbuhan UMKM harus dilindungi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008.

SAK EMKM

Kemajuan UMKM turut didukung oleh sehatnya keuangan UMKM. Sehat atau tidaknya keuangan UMKM dapat tercermin dari laporan keuangan UMKM tersebut. Untuk memastikan laporan keuangan UMKM mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di level internal dan eksternal, UMKM wajib menggunakan standar pembuatan laporan keuangan khusus UMKM yang disebut SAK EMKM.

Pembuatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk jenis usaha UMKM ditujukan untuk memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya. Dalam laporan keuangan terstandar tersebut, UMKM dapat mengakui, mengukur dan menyajikan semua informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Dalam SAK EMKM telah diatur dengan jelas jenis laporan keuangan yang harus dibuat UMKM misalnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Dengan penyusunan yang tersandar SAK EMKM tersebut, UMKM juga mudah melakukan perhitungan pajak dan dengan mudah pula mendapatkan kredit dari bank mengingat salah satu syarat utama untuk pengajuan kredit di bank adalah kemampuan membayar kredit yang salah satu indikatornya tercermin dari laporan keuangan yang tersandar SAK EMKM. Di sisi lain, penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM lebih memudahkan pelaku UMKM karena lebih sederhana (Pertama dan Sutapa, 2020).

METODE

Kajian kepustakaan (*library research*) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini memfokuskan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait objek penelitian dalam dua kurun waktu yakni masa lalu dan saat ini. Metode penelitian ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai macam literatur relevan seperti buku, referensi, majalah, catatan hingga penelitian terdahulu yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur terpercaya tersebut kemudian akan membawa peneliti menemukan jawaban dari penelitian (Yaniawati, 2020).

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan mencari, mengumpulkan, mempelajari, hingga menganalisis data penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 tahap yakni; *editing*, *organizing* dan *finding* (Sugiyono, 2012). Selanjutnya analisis data dilakukan dengan tahapan: Deduktif, Induktif, Interpretatif, Komparatif dan Historis (Indrawan dan Yaniawati, 2014).

PEMBAHASAN

Secara umum, SAK EMKM masih menjadi masalah bagi sebagian UMKM di Indonesia. Walaupun sudah ada UMKM yang menerapkan SAK EMKM namun masih banyak pula UMKM di berbagai daerah di Indonesia yang belum menerapkannya. Hal ini dapat dilihat dalam jbaran beberapa hasil penelitian berikut yang peneliti rangkum dalam pembagian di beberapa daerah di Indonesia.

Potret Penerapan SAK EMKM di UMKM Wilayah Jabodetabek

UMKM berkembang dengan baik di Kota Tangerang. Dalam wawancaranya di laman umkm.tangerangkota.go.id (2020) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang, mengungkapkan bahwa UMKM menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan UMKM di Kota Tangerang tercatat baik. Pertumbuhan UMKM yang baik di Tangerang ini, nampaknya tidak didukung oleh pencatatan keuangan yang baik pula. Hal ini tergambar dalam hasil penelitian Putra (2018) yang menyatakan bahwa mayoritas UMKM di Kota Tangerang dengan presentase 80,4% belum menerapkan pencatatan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang bersesuaian dengan standar SAK EMKM. Adapun belum diaplikasikannya SAK EMKM ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan pelaku

UMKM yang dinilai kurang sesuai dengan bidang akuntansi sehingga menyulitkan untuk menerapkan SAK EMKM. Ada pula pelaku UMKM yang mengakui bahwa mereka bahkan belum mendapatkan informasi tentang penerapan SAK EMKM dalam pencatatan dan pembukuan keuangan UMKM padahal SAK EMKM telah resmi diberlakukan IAI sejak tanggal 1 Januari 2018. Kekurangan informasi dari pelaku UMKM turut bersumbangsih pada belum diterapkannya SAK EMKM di Kota Tangerang (UMKM (Irawati, dkk, 2020).

Selain di Kota Tangerang, pertumbuhan UMKM di Kota Depok juga terbilang subur. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok mencatat terdapat kurang lebih 150.000 pelaku UMKM di Kota Depok. Namun, jumlah pelaku UMKM yang besar ini ternyata masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang bersesuaian dengan standar SAK EMKM. Bahkan ada pula UMKM yang belum memiliki laporan keuangan. Transaksi bisnis para pelaku UMKM ini belum tergambar dengan baik dalam laporan keuangan berstandar SAK EMKM karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM tentang SAK EMKM (Arieftiara, Putra, Masripah: 2019). Dampaknya pelaku UMKM tidak dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran serta kesulitan untuk mencari tambahan modal mengingat laporan keuangan adalah alat komunikasi utama antara pihak internal dan eksternal yang dapat membantu dalam pengembangan usaha.

Penelitian Hanifat dan Leo (2019) juga menemukan fakta bahwa SAK EMKM umumnya hanya diterapkan pada pencatatan keuangan usaha menengah di Kota Depok, sedangkan kelompok usaha kecil dan mikro belum menerapkannya. Kurangnya pendampingan hingga edukasi terkait SAK EMKM dari pembuat standar kepada para pelaku usaha membuat pengetahuan akan SAK EMKM minim dan berdampak pada tidak diterapkannya SAK EMKM. *ASEAN Federation of Accountants* (2018) juga mendukung fakta tersebut bahwa akuntan profesional di Indonesia belum secara maksimal memberikan pendampingan kepada UMKM terkait pelaporan keuangan itu sendiri. Pemerintah juga dinilai lebih berfokus pada penerimaan pajak hingga mengesampingkan edukasi berkelanjutan tentang SAK EMKM pada para pelaku UMKM.

Praktik yang sama terlihat pada UMKM MAWAR di Jakarta Timur. Pemilik UMKM menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait SAK EMKM. Pencatatan keuangan UMKM ini dilakukan dengan sangat sederhana dan masih manual, yang dicatat hanyalah pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di UMKM tersebut (Adila, Ulupui dan Utamingtyas, 2021). Pencatatan ini jelas tidak bersesuaian dengan SAK EMKM mengingat SAK EMKM menyarankan pelaku usaha untuk membuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Di sisi lain, mayoritas pelaku UMK setuju untuk menerapkan SAK EMKM jika mereka memiliki pengetahuan yang cukup, pendampingan berkala serta sosialisasi dari pihak pembuat standar (Rusmanah dan Adrianto, 2021).

Potret Penerapan SAK EMKM di UMKM wilayah Jawa dan Yogyakarta

Widiastoeti dan Sari (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian UMKM di Kota Surabaya terpotret mengalami kendala dalam menerapkan SAK EMKM dengan alasan kecilnya ruang lingkup, rendahnya tingkat kompetensi dan keterbatasan dalam sumber daya manusia. Dengan keterbatasan tersebut, proses pencatatan dan pelaporan keuangan di UMKM masih secara

seederhana yang juga berarti belum sesuai dengan SAK EMKM. Sesuai SAK EMKM harusnya UMKM melaporkan laporan posisi keuangan hingga laporan laba rugi sedangkan dalam praktiknya sebaaiaan UMKM di Surabaya hanya membuat catatan atas pemasukan dan pengeluaran, sesuai dengan pemahaman mereka. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran menggunakan sistem kas kecil saja juga dilakukan oleh UMKM Nukita *Food* (Triananda, 2018).

Fitriyyah dan Sularsi (2020) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM di Desa Kebakalan Sidoarjo Jawa Timur, belum melakukan pencatatan akuntansi menggunakan SAK EMKM. Senada dengan hasil penelitian sebelumnya di atas, pemilik usaha belum memahami ilmu akuntansi sehingga pencatatan tidak ada pembuatan laporan keuangan. Adapun tidak diterapkannya SAK EMKM menyebabkan masih ada pencampuran antara uang pribadi pemilik dan uang usaha. Uang usaha digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebaliknya uang pribadi digunakan untuk uang usaha.

Belum diberlakukannya SAK EMKM juga terjadi di Kota Tegal. Para pelaku UMKM di Kota Tegal belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait standar EMKM. Standar EMKM yang mengatur terkait bagaimana pelaporan keuangan belum dipahami secara utuh oleh para pelaku UMKM. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan para pelaku usaha melakukan pencatatan dengan sederhana (Hetika dan Mahmudah; 2017). Mayoritas karyawan UMKM yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga yang tidak memiliki pengetahuan cukup di bidang akuntansi membuat SAK EMKM tidak diterapkan oleh di UD Andika Jaya Jember. Terbatasnya kemampuan karyawan dalam bidang akuntansi juga menyebabkan tidak diterapkannya SAK EMKM di UMKM Bintang Malam, Pekalongan-Jawa Tengah. Walaupun pelaku UMKM mengakui pentingnya membuat laporan keuangan yang terstandar , namun karena rendahnya pengetahuan; pelaku UMKM hanya mencatat informasi yang terkait dengan penjualan dan penerimaan saja. Kedua informasi inilah yang digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengambil keputusan (Ayu, 2017).

Azahra (2015) juga dalam penelitiannya di Surakarta menemukan fakta sejenis bahwa belum semua UMKM menerapkan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan. Walau sudah ada sebelas UMKM yang mencatat transaksi bisnisnya, namun pencatatan tersebut juga belum sesuai standar, hanyalah bentuk pencatatan sederhana yang bersesuaian dengan keinginan, pemahaman dan kebutuhan pelaku UMKM di Surakarta. Dalam penelitian Lailiya dan Nurhayati (2018) juga ditemukan hal senada bahwa rendahnya pengetahuan akuntansi pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor kunci belum diterapkannya SAK EMKM dalam pelaporan keuangan.

Minimnya pengetahuan tentang SAK EMKM yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan hingga pembukuan keuangan sesuai standar juga terjadi pada para pengrajin mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Laporan keuangan yang dimiliki dibuat seadanya sesuai pemahaman para pengrajin. Laporan ini dibuat sesuai pemahaman mereka agar memudahkan dalam pengambilan keputusan demi keberlanjutan usaha. Para pengrajin mebel tidak mendapatkan informasi langsung dari pembuat standar tentang bagaimana aplikasi standar tersebut di level UMKM sehingga tidak memahami bagaimana harus menerapkannya(Alfitri, 2014).

Faktor lain yang turut menghambat diterapkannya SAK EMKM adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha. Dasar dari rendahnya kesadaran adalah juga karena keterbatasan pengetahuan terhadap standar tersebut. Ada pelaku usaha yang menganggap bahwa penerapan

akuntansi yang bersesuaian dengan standar membutuhkan biaya yang tinggi dan dianggap membuang waktu dalam pengerjaannya. Para pelaku mengakui dengan tidak diterapkannya SAK EMKM informasi akuntansi dalam usaha tersebut tidak maksimal digunakan untuk pengambilan keputusan usaha UMKM di Desa Gembongsari, Banyuwangi (Elvia, 2016). Selain itu, ada pula pelaku UMKM yang berpendapat bahwa fokus pemilik UMKM turut memengaruhi penerapan SAK EMKM. Ada pelaku UMKM yang lebih berfokus pada kegiatan produksi sehingga mengesampingkan penyusunan laporan keuangan. Perbedaan fokus, rendahnya kesadaran dan minimnya sumber daya manusia menyebabkan tidak diterapkannya SAK EMKM di UD Dua Putri Solehah di Probolinggo (Amani, 2018)

Potret Penerapan SAK EMKM di UMKM di Wilayah Indonesia Timur, Bali, Kalimantan dan Sumatera

Pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara Makasar juga belum menerapkan SAK EMKM karena tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pencatatan keuangan. Di sisi lain tidak ada pengawasan dari pihak pemerintah, lembaga terkait dan regulator juga menyebabkan tidak diterapkannya SAK EMKM, (Handayani, 2019). Tidak hanya di Makasar, pelaku di UMKM di Samarinda juga mengalami kesulitan dalam menerapkan SAK EMKM. Minimnya tenaga yang memahami tentang bagaimana membuat laporan keuangan menjadi hambatan utamanya. Di sisi lain, UMKM juga mementingkan bagaimana harus berproduksi dengan baik untuk meningkatkan penjualan. Pencatatan keuangan yang tersandar SAK EMKM bukanlah prioritas bagi pelaku usaha sehingga dibiarkan saja (Barus, Indrawaty dan Solihin, 2019). Selain di beberapa daerah di atas, penerapan SAK EMKM di Kabupaten Kebumen hanya digunakan oleh sebagian UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi dan keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM, (Larasati dan Farida, 2021)

Untuk membantu keberlanjutan usaha, pelaku UMKM Bengkel Evry *Service* AC Mobil Kota Lubuklinggau membuat laporan pendapatan dan pengeluaran walaupun masih ditemukan banyak kekeliruan. Pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan yang lengkap karena minimnya pengetahuan (Oktaria dan Triharyati, 2017). Ismadewi, Herawat dan Atmaja (2017) juga menemukan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan organisasi yang kecil menyebabkan Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan juga tidak menyusun laporan keuangan. Belum diterapkannya SAK EMKM dalam pelaporan keuangan UMKM terlihat dari masih ada penggabungan dalam penggunaan keuangan. Pemilik UMKM masih menggunakan uang bisnis untuk kepentingan pribadi dan sebaliknya uang pribadi untuk kebutuhan bisnis di sebagian besar pelaku UMKM distro di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Ala dan Efendi (2019) dalam penelitian pada UMKM di NTT juga menemukan fakta bahwa lima jenis laporan keuangan yang diusulkan dalam SAK EMKM tidak para pelaku UMKM tidak membuat laporan berdasarkan aturan tersebut.

KESIMPULAN

Studi kepustakaan di atas menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Indonesia belum menerapkan SAK EMKM. Penerapan SAK EMKM belum efektif terjadi pada kalangan pengguna UMKM di Indonesia. Adapun alasannya belum diterapkan EMKM adalah ketidakpahaman pemilik

usaha atas proses pencatatan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya pendampingan dari pemerintah atau regulator. Dengan demikian dapat dipastikan SAK EMKM yang diterbitkan IAI belum efektif pemberlakuannya. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang menerbitkan SAK EMKM seharusnya memiliki program jangka panjang untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait standar pencatatannya serta melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui paham atau tidaknya UMKM terhadap SAK EMKM yang diterbitkan. Pendampingan yang berkelanjutan tersebut akan mendorong penggunaan SAK EMKM secara lebih masif dan efektif.

Daftar Pustaka

Sumber Penulisan Artikel Jurnal

- Alfitri, Arri. Ngadiman. Sohidin. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. *Jurnal : Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 2 No. 2.
- Alifita Lutfiaazahra. (2015). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada UMKM Pengrajin Batik Di Kampong Batik Laweyan Surakarta, *Jurnal-Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta
- Cahyanti Hana Pratiwi (2018). Penerapan Akuntansi Persediaan Berbasis SAK EMKM Pada UD Andika Jaya Jember. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol2, No.1
- Deddy Kurniawansyah. (2016). Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Unj e-Proceeding*
- Dianwicakasih Arieftiara, Andi Manggala Putra, Masripah. 2019. Peningkatan Kemampuan Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Dengan Sak Emkm Melalui Pendampingan. *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Ghozi Triananda (2018). Implementasi SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan UMKM Nukita Food. *Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*
- Hasyim Diana. (2013). Kualitas Manajemen keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *JUPIIS* Vol. 5, No. 2
- Helda Marlin Ala dan Boy Supriana Efendi. 2019. Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP dengan Pendekatan Analisis SWOT pada UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi dan Kebijakan*, Vol.4, No.1
- Hetika, Nurul Mahmudah (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 5, No. 2

- I Gde Agung Wira Pertama, I Nyoman Sutapa. (2020). Tingkat Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM Dan Upaya Peningkatan Penerapan SAK EMKM Dilihat Dari Persepsi UMKM Dan Sosialisasi SAK EMKM. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*; Vol. 12, No. 1
- Ni Komang Ismadewi, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tungga Atmaja. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler (Study Kasus Pada Usaha I Wayan Sudiarsa Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol.8, No. 2
- Ningtyas Jilma Dewi Ayu. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1.
- Nurlela & Heny Elvia (2016). Penerapan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK ETAP Pada Toko Jamu Nikisami. *Jurnal Bisnis Administrasi*, Vol. 5, No. 2
- Rahmad Firdaus and Ludovicus Sensi Wondabio (2018) ISSN: 2352-5428. Financial Report for Micro, Small, and Medium Enterprise According to Financial Accounting Standards: Case Study Rafita Cake. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, Vol. 55
- Rifda Adila , I Gusti Ketut Agung Ulupui , Tri Kesti Utamingtyas. 2021. Implementasi SAK EMKM dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan : Studi Kasus UMKM Mawar. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021
- Tatik Amani. 2018. Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Probolinggo). *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, Vol. 2, No. 2.
- Tri Utami, Wiwit Irawati, Zulfa Rosharlianti, Dea Annisa, Dila Angraini. 2020. Penerapan Sak-Emkm Pada Umkm Scale Up Tangerang Selatan Melalui Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan Mikro Dan Kecil (SI APIK). *ABDIMISI* Vol. 1 No. 2
- Weli Oktaria, Eri Triharyati (2017). Judul Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Bengkel Evry Service AC Mobil Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini:UIGM*, Vol.8, No.2

Sumber Penulisan dari buku

- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, teknik dan aplikasi smartpls 3.0 untuk penelitian empiris* (2 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan- IAI Global. In IAI Global
- Solomon, M. R., Bamossy, G., & Askegaard, S. (2014). *Consumer behaviour: A European perspective* (5 ed.). Harlow: Pearson Higher Education.

Undang – Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Sumber Penulisan Report Instansi diperoleh secara Online

ASEAN Federation of Accountants. (2018). The Institutional Environment for Small and Medium Enterprises (SMEs) and Roles for the Accounting Profession ASEAN PERSPECTIVES. www.Aseanaccountants.Org

Badan Pusat Statistik. (2012). Konsep dan Definisi Perusahaan Industri Pengolahan. <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dansedang.html#subjekViewTab1>

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang. 400 UKM terbentuk di Kota Tangerang dari munculnya Kampung Tematik. <https://umkm.tangerangkota.go.id/list-berita/berita/kFXq3H>.

Statistik Daerah Kota Batu 2016 (35790.1607). Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Batu Jawa Timur: https://batukota.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kota-Batu-2016.pdf

Sumber Penulisan Media Online

Salim, M. A. (2016). Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Tembus 3,5 Juta Orang. Retrieved from <http://www.malangtimes.com/baca/8357/20160105/185357/kunjungan-wisatawan-di-kota-batu-tembus-35-juta-orang/>